

PENYERAPAN TENAGA KERJA DI SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN

Kasus Tanaman Padi di Sulawesi Selatan Tahun 1982

Oleh: Subiyanto.

INTISARI.

Pada dasarnya masalah ketenagakerjaan di Subsektor Tanaman Pangan berkaitan dengan sistem perekonomian suatu daerah. Sumbangan Subsektor Tanaman Pangan terhadap nilai tambah bruto Sektor Pertanian di Sulawesi Selatan dari tahun 1978 — 1981 rata-rata sebesar 63%, di mana tanaman padi menyumbang 40%. Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan di Sulawesi Selatan relatif rendah, hal mana disebabkan oleh timpangnya lapangan kerja yang tersedia dan jumlah tenaga kerja yang ada, ditunjang oleh tingkat ketrampilan dan permodalan petani yang serba kurang. Dengan demikian ada dua permasalahan pokok di dalam tenaga kerja di bidang pertanian tanaman pangan, yaitu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Menurut hasil survei, sistem pangan beras mulai produksi sampai dengan konsumsi di Sulawesi Selatan pada tahun 1982 mampu menyerap 76.834 ribu hari orang kerja, atau sekitar 384.170 tenaga kerja, di mana jumlah ini merupakan 20% dari total tenaga kerja yang ada.

* Terima kasih disampaikan kepada Dra. Sri Rustiati dan Ir. Tri Djoko Wahjono yang telah membantu dalam penyediaan data, juga kepada seluruh staf Kelompok Pertanian dan Pangan Deputi Bidang Analisa Sistem BPP Teknologi yang telah membantu dalam membuat 'Deskripsi Sistem'.

Petani dan Swasta merupakan pelaku yang banyak menyerap tenaga kerja, dibanding dengan Koperasi Unit Desa (KUD) dan Depot Logistik (Dolog) yang hanya mampu menyerap tenaga kerja di bawah satu persen.

Pelaksanaan penyerapan tenaga kerja di Subsektor Tanaman Pangan untuk masa mendatang dapat dilaksanakan dengan peningkatan usaha intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi. Program agroindustri yang merupakan pencerminan dari diversifikasi vertikal, apabila tepat penempatannya, akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, produktifitas kerja dan nilai tambah dari produk pertanian pangan.

PENDAHULUAN.

Dalam strategi pembangunan nasional jangka panjang, sektor pertanian diletakkan sebagai titik sentral pembangunan. Termasuk di dalam sektor pertanian di sini adalah subsektor tanaman padi. Masalah pangan beras sangat kompleks dan menyangkut kepentingan orang banyak, oleh karena itu penanganannya melibatkan berbagai sektor pemerintah. Bagi Indonesia yang jumlah penduduknya demikian besar, pangan beras merupakan masalah strategis yang memerlukan penanganan baik dari sektor pemerintah maupun swasta.

Namun demikian, kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta terikat pada kriteria seberapa besar mampu menciptakan lapangan kerja. Dalam temu wicara tentang kerangka landasan pembangunan yang diadakan LIPI pada tanggal 5—6 Maret 1984, Djiwandono berpendapat bahwa supaya pembangunan Indonesia dapat lepas landas harus ada keseimbangan yang serasi antar berbagai bidang, termasuk di dalamnya bidang perekonomian maupun hal-hal yang berkaitan langsung dengan perekonomian yaitu penyerapan tenaga kerja. Hal ini mengingat bahwa tenaga kerja yang harus diserap pada Pelita IV jumlahnya 9,3 juta orang, serta sisa Pelita III yang belum terserap jumlahnya 5,58 juta orang.¹⁾ Selanjutnya dalam temu wicara tersebut Sutopo Yuwono berpendapat bahwa penyerapan tenaga kerja sebesar 9,3 juta orang pada Pelita IV merupakan tugas dari seluruh sektor, dan secara ideal dapat terserap apabila laju pertumbuhan kesempatan pada pelita IV sebesar 3,2%, di mana Sektor Pertanian mendapat tugas sebesar 1,6%.

Tulisan ini akan membicarakan penyerapan tenaga kerja dan beberapa masalahnya dalam Subsektor Tanaman Pangan khususnya beras, dengan mengambil kasus di Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1982. Maksud penulisan di sini adalah untuk memberikan gambaran (deskripsi) tentang seberapa jauh subsektor tanaman pangan (beras) mampu menyerap tenaga kerja, khususnya di Propinsi Sulawesi Selatan. Di samping itu juga dimaksudkan untuk mengetahui penyebaran dari tenaga kerja tersebut ke

1) Kompas, 6 Maret 1984.

dalam kelompok-kelompok kegiatan dari sistem yang ada, serta tinjauan atas beberapa permasalahan yang dihadapi.

KERANGKA ANALISA.

Pengertian.

Yang dimaksud dengan tenaga kerja di sini adalah tenaga untuk melakukan kegiatan teknis lapangan (field labour) dan tidak termasuk tenaga kerja untuk administrasi dan sebagainya. Dalam perhitungan, satuan tenaga kerja ini dinyatakan sebagai hari orang kerja (HOK). Menurut Biro Pusat Statistik, yang termasuk ke dalam angkatan kerja adalah penduduk yang berumur di atas 10 tahun.

Deskripsi Sistem dan Penentuan Responden.

Pengkajian arus beras mulai produksi sampai konsumsi dilakukan melalui pendekatan sistem. Lebih jauh sistem ini dibagi atas lima subsistem berdasarkan kegiatan dan bentuk komoditi yang ditangani. Kelima subsistem tersebut adalah Subsistem Produksi, Pengumpulan, Pengolahan, Penyaluran dan Konsumsi.

Responden diambil dari pelaku-pelaku yang berperan dalam kegiatan-kegiatan produksi, pengumpulan, pengolahan, dan penyaluran. Adapun pelaku-pelaku tersebut adalah sebagai berikut :

| Subsistem: | Pelaku: |
|-------------------|---|
| a. Produksi | — Petani. |
| a. Pengumpulan | — Petani, swasta (Pedagang Pengumpul Kecil dan Pengumpul Besar), Koperasi Unit Desa (KUD) dan Depot Logistik (Dolog). |
| c. Pengolahan | — Petani, Swasta dan KUD. |
| d. Penyaluran | — Petani, Swasta, KUD, Dolog, Pedagang Besar dan Pengecer. |

Dalam hal ini tidak dilakukan analisa penyerapan tenaga kerja di Subsistem Konsumsi karena dianggap tidak ada kegiatan khusus dengan beras yang bersifat menyerap tenaga kerja.

Metode Perhitungan.

Setiap pelaku diidentifikasi kegiatan-kegiatannya dan juga teknologi yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian dicari

kebutuhan hari kerja per ton atau per hektar (Ha.) dan jumlah ton atau hektar yang ditangani. Dengan mengalikan antara hari kerja per ton atau per hektar dengan jumlah ton atau hektar yang ditangani menurut pola kegiatan dan teknologi yang dilakukan, maka akan diperoleh jumlah penyerapan tenaga kerja dari suatu pelaku. Di samping itu juga diidentifikasi hubungan antar kegiatan, pelaku dan subsistem, untuk menentukan arus volume input-output.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Kasus Tanaman Padi Tahun 1982.

Berdasarkan hasil penelitian arus volume masuk dan volume keluar dari setiap teknologi, kegiatan dan pelaku dari setiap subsistem, maka diperoleh penyerapan tenaga kerja di Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1982 yang secara ringkas disajikan pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 tersebut apabila dilihat berdasarkan subsistem ternyata Subsistem Produksi menyerap tenaga kerja paling banyak, yaitu sebesar 61,03%, kemudian diikuti oleh Subsistem Pengumpulan yang mampu menyerap sebesar 28,37%. Sebaliknya Subsistem Pengolahan hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 3,88%, dimana ini merupakan jumlah yang paling kecil di antara subsistem lainnya.

Tabel 1.
Penyerapan Tenaga Kerja Subsektor Tanaman Pangan Beras
di Sulawesi Selatan tahun 1982.

(Dalam 1000 HOK)

| Pelaku | Subsistem | | | | Total |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | Produksi | Pengum- pulan | Pengolahan | Penyaluran | |
| — Petani | 52.885 | 18.890 | — | 155 | 71.930 (83,01%) |
| — Swasta | — | 5.471 | 3.322 | 1.562 | 10.355 (11,95%) |
| — KUD | — | 222 | 39 | 208 | 469 (0,54%) |
| — Dolog | — | 5 | — | 41 | 46 (0,05%) |
| — Pdg. Besar | — | — | — | 2.536 | 2.536 (2,93%) |
| — Pengecer | — | — | — | 1.319 | 1.319 (1,52%) |
| Total | 52.885 (61,03%) | 24.588 (28,37%) | 3.361 (3,88%) | 5.821 (6,72%) | 86.655 (100,00%) |

Untuk menjelaskan alasan terjadinya distribusi tersebut kita kembali pada pengertian dari Subsistem Produksi, Pengumpulan dan Pengolahan. Seperti yang dijelaskan pada Bab Kerangka Analisa, pembagian subsistem didasarkan pada bentuk komoditi dan kegiatan. Subsistem Produksi menangani seluruh kegiatan berproduksi sampai dengan panen. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh Subsistem Produksi adalah persiapan dan pengolahan tanah, persemaian, penanaman, penyiangan, pemupukan, penyemprotan dan panen. Dengan demikian komoditi yang ditangani hanya sampai padi basah saja. Setelah dipanen, kegiatan dan bentuk komoditi selanjutnya ditangani oleh Subsistem Pengumpulan, sampai diperoleh komoditi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG). Untuk Subsistem Pengumpulan kegiatan yang dilakukan adalah pengangkutan, perontokan, pengeringan, pembersihan, pengemasan dan penyimpanan. Selanjutnya Subsistem Pengolahan akan menggiling GKG dari Subsistem Pengumpulan sehingga diperoleh Beras Giling yang selanjutnya diteruskan ke Subsistem Penyaluran. Jadi kegiatan Subsistem Pengolahan dalam hal ini hanya mengubah GKG menjadi Beras Giling.

Terlihat dari uraian di atas bahwa jumlah kegiatan di Subsistem Produksi lebih banyak dibanding dengan jumlah kegiatan di Subsistem lainnya. Disamping itu jenis kegiatannya sendiri juga membutuhkan tenaga kerja banyak, terutama pada persiapan dan pengolahan tanah yang ditunjang oleh pemakaian teknologinya yang masih bersifat tradisional dan bersifat banyak menyerap tenaga kerja. Untuk Subsistem Pengolahan kegiatan yang dilakukan hanya menggiling gabah menjadi beras. Dari survei diperoleh keterangan bahwa untuk Sulawesi Selatan pengolahan gabah dengan menggunakan teknologi tumbuk tangan sekarang hampir tidak dijumpai lagi. Pengolahan dengan tumbuk tangan hanya dilakukan pada acara-acara tertentu saja, misalnya pada acara adat. Dengan demikian hampir semua gabah diolah dengan menggunakan mesin yang relatif lebih sedikit menyerap tenaga kerja.

Kemudian apabila ditinjau berdasarkan pelakunya, terlihat dari Tabel 1 bahwa pelaku-pelaku yang banyak menyerap tenaga kerja adalah Petani dan Swasta yang masing-masing besarnya 83,01% dan 11,95%. Pelaku yang kurang menyerap tenaga kerja adalah KUD dan Dolog yang besarnya kurang dari satu persen.

Penyerapan tenaga kerja yang besar pada pelaku Petani ini dapat dimengerti karena Petani dalam hal ini merupakan satu-satunya produsen, sedangkan diketahui bahwa kegiatan berproduksi paling banyak menyerap tenaga kerja. Disamping sebagai produsen, petani juga menangani sendiri kegiatan pasca panennya, baik untuk komoditi yang akan dikonsumsi sendiri maupun yang akan dijual dalam bentuk padi, gabah maupun beras. Hasil survei menunjukkan bahwa 24% dari produksi dikonsumsi sendiri.

sedangkan sisanya dijual dalam bentuk padi dan gabah sebesar 63% dan dalam bentuk beras sebesar 13%. Mengingat besarnya peranan petani dalam sistem pangan beras, maka dapat disadari kalau banyak sasaran kebijaksanaan pemerintah lebih ditekankan kepada Petani.

Pelaku Swasta banyak menyerap tenaga kerja terutama dalam fungsinya sebagai anggota dari Subsistem Pengumpulan dan Pengolahan. Swasta banyak berpengaruh dalam menampung/membeli hasil panen padi dan gabah petani. Dari 63% padi dan gabah yang dijual petani, 61% di antaranya dijual ke swasta, sedangkan sisanya dijual ke KUD. Kemudian berdasarkan survei diperoleh keterangan bahwa beras yang diperoleh dari pengolah swasta besarnya sekitar 99% dibanding dengan pengolah KUD yang hanya sekitar satu persen. Jadi besarnya penyerapan tenaga kerja di swasta cenderung disebabkan oleh banyaknya volume komoditi yang ditangani.

Meskipun KUD dan Dolog hanya sedikit menyerap tenaga kerja (kurang dari satu persen), tetapi kedua lembaga ini peranannya penting dalam sistem pangan. Peranan ke dua lembaga ini cenderung lebih ditekankan untuk stabilitas harga daripada sebagai penyedia lapangan kerja. Seperti diketahui kedua lembaga ini membeli gabah dan beras (dari setiap pelaku) dengan harga yang tetap. Ini berarti bahwa ke dua lembaga tersebut membeli gabah dan beras dengan harga rendah pada saat harga di pasaran lebih tinggi dari harga yang ditentukan mereka, sebaliknya membeli dengan harga tinggi pada saat harga di pasaran lebih rendah. Disamping itu KUD sedikit menyerap tenaga kerja karena volume (gabah dan beras) yang ditanganinya memang kecil. Ada dua alasan untuk menjelaskan keadaan ini. Alasan pertama karena KUD mempunyai keterbatasan permodalan maupun sarana, sedangkan alasan kedua adalah karena terbatasnya jumlah KUD yang ada. Bagi Petani yang daerahnya belum ada KUD, tentunya akan terlalu jauh apabila mereka harus menjual ke KUD yang ada di daerah lain, karena ini berarti tidak efisien baik dari segi biaya transportasi maupun kepepetan yang harus dihadapi, apalagi dilihat dari volume penjualannya yang umumnya kecil.

Lebih jauh apabila ditinjau secara keseluruhan, kegiatan sistem pangan di Propinsi Sulawesi Selatan tahun 1982 dapat menyerap 86.655 ribu hari orang kerja (tabel 1). Dengan asumsi satu orang bekerja selama 200 hari dalam setahun, maka jumlah tenaga kerja yang terserap adalah 433.275 orang. Kemudian apabila ini dibandingkan terhadap proyeksi angkatan kerja di Sulawesi Selatan tahun 1983 yang dibuat oleh Biro Pusat Statistik, jumlah ini merupakan 20% dari angkatan kerja yang ada. Sedangkan apabila dibandingkan terhadap angkatan kerja di Sektor Pertanian pada

tahun 1979 yang besarnya 1.025.715 orang²⁾, jumlah ini merupakan 42,2%. Sebagai perbandingan, menurut studi kasus yang dilakukan oleh LIPI, koefisien langsung penyerapan tenaga kerja pada sektor produksi padi dan tanaman pangan masing-masing adalah 16,1 dan 22,83³⁾. Sementara itu belum diperoleh informasi apakah yang dimaksud dengan sektor produksi pada penelitian yang dilakukan LIPI tersebut identik dengan Subsistem Produksi pada tulisan ini.

Kadaan Tenaga Kerja Pertanian di Sulawesi Selatan Saat ini.

Sumbangan Subsektor Tanaman Pangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Sulawesi Selatan yang didasarkan atas harga yang berlaku cenderung menurun, dari 34,66% pada tahun 1976 menjadi 28,72% pada tahun 1979⁴⁾. Ini mungkin dapat dijadikan indikator bahwa pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan di Sulawesi Selatan berjalan lambat. dari tahun 1978 — 1981 sumbangan nilai tambah bruto Subsektor Tanaman Pangan terhadap Sektor Pertanian berkisar dari 55,98% sampai dengan 66,62%. Pada periode yang sama, rata-rata pertumbuhan Sektor Pertanian di Sulawesi Selatan mencapai 4,69%. Pertumbuhan Sektor Pertanian ini dapat digolongkan rendah, apabila dibandingkan dengan Sektor Industri dan Konstruksi yang masing-masing besarnya 10,96% dan 19,87% (Kantor Statistik Sul-Sel, 1982).

Ada dua sebab yang mungkin dapat dipakai untuk menjelaskan lambatnya pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan di Sulawesi Selatan. *Pertama*, karena sempitnya kepemilikan ataupun luas usaha tani. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya rumah tangga tani yang mengusahakan lahan kurang dari 0,5 Ha. Dari total 734.753 rumah tangga tani, 48,47% di antaranya mengusahakan lahan di bawah 0,5 Ha. Bahkan inipun tidak semuanya lahan milik sendiri, karena ada beberapa rumah tangga tani yang mengusahakan lahan milik orang lain (penggarap) dengan cara bagi hasil. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.

-
- 2) Perbandingan terhadap tahun yang berbeda ini dikarenakan oleh adanya keterbatasan data.
 - 3) LIPI. 1983. Studi Kasus : Industri Pangan.
 - 4) Diolah dari Pendapatan Regional Propinsi-Propinsi di Indonesia.

Tabel 2

**Jumlah Rumah Tangga Tani Menurut Luas Lahan dan Kepemilikan
di Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1980**

(Unit)

| Luas Lahan | Milik Sendiri | Milik Orang Lain | Milik Sendiri & Orang Lain | Total |
|-------------------|---------------|------------------|----------------------------|---------|
| •Dibawah 0,5 Ha | 104.403 | 27.515 | 14.032 | 145.950 |
| •0,25 HA — 0,5 Ha | 133.422 | 44.207 | 32.281 | 209.910 |
| •Di atas 0,5 Ha | 243.539 | 43.077 | 92.277 | 378.893 |
| Total | 481.364 | 114.799 | 138.590 | 734.753 |

Sumber : Sensus Penduduk Tahun 1980.

Seperti diketahui bahwa dengan luas lahan kurang dari 0,5 Ha sebenarnya petani tidak perlu harus setiap hari berada di lapangan. Namun demikian karena tidak adanya lapangan pekerjaan lain (sambilan) sering dijumpai mereka dalam sehari-harinya berada di lapangan, walaupun di lapangan mungkin mereka lebih banyak menganggur daripada kerjanya. Apabila dilihat jam efektif kerjanya mungkin mereka ini dapat digolongkan sebagai setengah penganggur.

Ke dua, petani yang tinggal di desa umumnya miskin, baik dari segi materiil, tingkat kecerdasan maupun ketrampilan. Ini menyebabkan mereka lemah dalam posisinya. Sering petani tidak dapat memanfaatkan kesempatan baik yang diberikan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya, karena ketiadaan materi. Sebagai misal adalah fasilitas kredit Bimas. Untuk mengambil kredit Bimas Petani harus mempunyai jaminan, paling tidak lahan usaha tani. Dengan demikian Petani Penggarap (mengerjakan lahan orang lain) tidak mungkin dapat mengambil kredit ini. Adi Sasono (1982) mengatakan bahwa produktivitas kerja ditentukan oleh teknologi, modal dan ketrampilan yang tinggi⁵⁾. Disamping itu karena tidak adanya keseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan kesempatan kerja yang ada menyebabkan harga atau nilai tenaga kerja di pedesaan (petani) menjadi rendah, dan ini mengakibatkan mereka miskin. Selanjutnya karena mereka miskin umumnya mereka kurang gizi, dan karena kurang gizi maka produktivitas kerja mereka rendah sehingga mereka miskin. Demikian akhirnya seperti lingkaran yang tidak berujung pangkal.

5) Majalah "Optimis" No. 26, Maret 1982.

Kemungkinan Pengembangan.

Seperti diungkapkan pada bagian depan, bahwa penyerapan tenaga kerja pada Pelita IV merupakan tugas dari setiap sektor maupun subsektor, termasuk di dalamnya Subsektor Tanaman Pangan. Menurut Kantor Sensus Statistik Sulawesi Selatan, jumlah penduduk di atas 10 tahun yang masih mencari kerja (menganggur) pada tahun 1980 adalah 50.833 orang, atau sekitar 3,1% dari total angkatan kerja yang ada. Diduga jumlah ini makin meningkat pada tahun 1982. Ini berarti harus ada perluasan kesempatan kerja, karena disadari oleh Pemerintah bahwa dengan memperluas kesempatan kerja di samping menambah nilai ekonomis juga meningkatkan nilai kemanusiaan dengan menumbuhkan nilai harga diri bagi penduduknya, sehingga memberi isi kepada azas kemanusiaan (Birowo, 1983).

Telah dijelaskan bahwa untuk menyerap tenaga kerja pada Pelita IV, secara ideal harus dicapai pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 3,2% di mana Sektor Pertanian mendapat tugas sebesar 1,6%. Selanjutnya apabila pernyataan ini kita pakai, kemudian dikaitkan dengan peranan Subsektor Tanaman Pangan dan Tanaman Padi terhadap nilai tambah bruto Sektor Pertanian dari tahun 1978 — 1981 yang besarnya masing-masing sekitar 63% dan 40%, maka pada tahun 1980 saja jumlah penganggur di Subsektor Tanaman Pangan di Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- Tanaman Pangan = $1,6/3,2 \times 0,63 \times 50,833$ orang = 16.012 orang.
- Tanaman Padi = $1,6/3,2 \times 0,40 \times 50,833$ orang = 10.167 orang.

Apabila dikaji permasalahan-permasalahan di atas, sebetulnya ada dua tugas yang harus dikerjakan oleh Subsektor Tanaman Pangan, yaitu meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan Trilogi Pembangunan yang menjadi pegangan arah pembangunan, peningkatan produktivitas kerja tersebut cenderung mengarah ke pertumbuhan, sedangkan peningkatan kesempatan kerja mengarah ke pemerataan. Ini merupakan suatu tantangan, bagaimana mengejar pertumbuhan sekaligus mengejar pemerataan. Paling tidak kita harus dapat mengejar pertumbuhan tanpa harus mengorbankan pemerataan, dan begitu pula sebaliknya. Untuk itulah diperlukan strategi pembangunan (pertanian) yang baik, di mana penyerapan tenaga kerja didasarkan atas perencanaan khusus, dan tidak hanya merupakan konsekuensi logis dari adanya pembangunan di sektor lain.

Peningkatan produktivitas kerja dan kesempatan kerja di Subsektor Tanaman Pangan di Sulawesi Selatan mungkin dapat dilakukan dengan usaha yang selama ini sudah cukup dikenal, yaitu Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Diversifikasi.

Intensifikasi.

Intensifikasi dalam hal ini berarti meningkatkan daya guna lahan dengan cara meningkatkan atau lebih mengintensifkan penggunaan sarana produksi melalui program Bimas/Inmas. Sebagai hasilnya, hal ini tidak saja meningkatkan produksi per satuan luas melainkan juga meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas kerja. Menurut Sayogya⁶⁾, dengan intensifikasi akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja sebesar sekitar 26%. Dari survei ini diperoleh hasil bahwa lahan beririgasi teknis dapat menyerap tenaga kerja untuk kegiatan berproduksi (Subsistem Produksi) lebih banyak dibanding lahan kering, yaitu 78 HOK/Ha dibanding 57 HOK/Ha, atau berbeda sekitar 37%. Ini berarti bahwa seandainya tugas penyerapan tenaga kerja (pada tanaman padi) dilakukan dengan cara Intensifikasi, berarti harus ada perluasan jaringan irigasi terutama ke daerah lahan kering, karena salah satu syarat agar suatu lahan (untuk tanaman padi) dapat masuk program Intensifikasi, adalah lahan tersebut harus berpengairan.

Namun demikian, melihat perkembangan lahan berpengairan teknis di Sulawesi Selatan dari tahun 1978 – 1982 yang justru menurun, dari 386.315 Ha tahun 1978 menjadi 254.882 Ha tahun 1982, kelihatannya tugas penyerapan tenaga kerja ini terlalu berat apabila hanya dibebankan pada program Intensifikasi saja. Untuk itu dipandang perlu meninjau program lainnya, yaitu program Ekstensifikasi dan Diversifikasi.

Dalam arti luas, Intensifikasi tidak hanya terbatas pada Subsistem Produksi saja, melainkan juga untuk kegiatan pasca panen (dalam hal ini untuk Subsistem Pengumpulan, Pengolahan dan Penyaluran). Intensifikasi pada kegiatan pasca panen berarti penanganan yang lebih intensif terhadap kegiatan pasca panen, dengan harapan dapat menekan volume susut sekecil mungkin. Dengan adanya sebagian volume yang diselamatkan, berarti ada penambahan komoditi dalam peredaran yang berarti pula akan menambah lapangan kerja, walaupun mungkin jumlahnya tidak begitu besar apabila dibandingkan dengan Subsistem Produksi.

Ekstensifikasi.

Ekstensifikasi berarti perluasan lahan, dan ini dapat dilakukan dengan pencetakan sawah-sawah baru. Biasanya ekstensifikasi di luar Jawa dikaitkan dengan program Transmigrasi. Lahan yang diperuntukkan biasanya berupa lahan kering atau lahan pasang surut. Dari total 843.000 Ha

6). Di dalam Birowo, A.T. 1983. Situasi Tenaga Kerja, Setengah Pengangguran dan Kesempatan Kerja di Sektor Pertanian. Departemen Pertanian,

tanah kering di Sulawesi Selatan pada tahun 1977, yang sudah dimanfaatkan sampai dengan tahun 1982 baru 25.210 Ha, atau sekitar 3%. Ini berarti masih terbuka kemungkinan untuk dilaksanakannya program Ekstensifikasi. Dengan adanya lahan baru akan menciptakan lapangan kerja baru, baik untuk kegiatan berproduksi maupun untuk pasca panen. Disamping itu akan diperoleh peningkatan produksi.

Apabila Ekstensifikasi di Sulawesi Selatan diarahkan untuk lahan kering, maka jumlah lahan yang harus dicetak terutama untuk menyerap sisa tenaga kerja sebanyak 10.167 orang (atau sekitar 2.033.400 HOK) di Subsektor Tanaman Padi dapat diperkirakan melalui tahapan sebagai berikut :

- Berdasarkan survei diketahui :
 - Produksi (Padi Basah) untuk lahan kering = 4,75 ton/ha.
 - Tenaga kerja yang terserap untuk kegiatan berproduksi = 57 HOK/ha.
 - Tenaga kerja yang terserap untuk kegiatan pasca panen = 0,87 HOK/ton.
- Apabila jumlah lahan yang akan dicetak sebesar x hektar, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl}
 57x + (4,75x \times 0,87 \text{ HOK}) & = & 2.033.400 \text{ HOK} \\
 61,13x & = & 2.033.400 \text{ HOK} \\
 x & = & 33.262 \text{ (hektar)}.
 \end{array}$$

Dibandingkan dengan jumlah tanah kering yang ada di Sulawesi Selatan, jumlah ini merupakan sekitar 4%.

Diversifikasi.

Dalam bidang pertanian dikenal dua arah Diversifikasi, yaitu vertikal dan horizontal. Diversifikasi vertikal berarti satu komoditi ditangani secara tuntas, dari Subsistem Produksi sampai subsistem berikutnya. Adapun Diversifikasi horizontal berarti pengelolaan pola tanam pada lahan tertentu dengan beberapa jenis komoditi.

Agroindustri merupakan contoh dari Diversifikasi vertikal, dimana peranan Subsistem Pengolahan tampak menonjol. Adanya pengolahan ini sangat membantu petani terutama dalam mengatasi sifat dari produk pertanian yang voluminus dan mudah rusak. Pada agroindustri dituntut adanya kesinambungan bahan baku (dalam hal ini produk pertanian) dan pemasaran. Dalam agroindustri ini akan tercipta kegiatan-kegiatan baru yang berarti akan membuka lapangan kerja baru. Disamping itu juga akan diperoleh peningkatan nilai tambah dari produk pertanian. Apabila

pendirian agroindustri ini ditekankan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan produktivitas kerja di bidang pertanian, maka akan lebih tepat apabila agroindustri ini ditempatkan di daerah pedesaan, di mana banyak petani bermukim dan menghasilkan bahan baku bagi agroindustri.

Sebagai salah satu pilihan untuk mengembangkan agroindustri, pola PIR pada tanaman pangan mungkin dapat dikembangkan, karena di sini terdapat perpaduan antara program Diversifikasi (dari inti) dan program Ekstensifikasi (dari plasma).

Di samping ke tiga usaha di atas, usaha lain untuk meningkatkan produktivitas kerja dapat dilakukan dengan menentukan batas minimum lahan usaha tani. Walaupun demikian selama sektor-sektor di luar pertanian pangan masih belum mampu menyerap tenaga kerja dengan baik, keterlaksanaan usaha ini masih dipertanyakan, karena ada kaitannya dengan terlalaikannya aspek pemeratan. Kalaupun sektor lain (di luar pertanian) sanggup menyediakan lapangan kerja pengganti, hal yang masih harus diperhatikan adalah ketrampilan. Mereka adalah orang desa yang miskin pendidikan dan ketrampilan, yang ketrampilannya hanya terbatas pada bidang pertanian. Pemindahan ke lapangan pekerjaan lain tentunya akan memakan waktu penyesuaian ketrampilan.

KESIMPULAN.

Subsektor Tanaman Pangan khususnya padi mempunyai peranan yang besar di dalam mendukung perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan, walaupun sumbangannya semakin tahun semakin menurun. Ini menunjukkan rendahnya produktivitas tenaga kerja atau cara kerja yang tidak efisien di Subsektor Tanaman Pangan, hal mana terjadi karena timpangnya antara jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan.

Sistem pangan beras mulai produksi sampai dengan konsumsi di Sulawesi Selatan pada tahun 1982 dapat menyerap 76.834 ribu hari orang atau sekitar 384.170 orang (tenaga kerja), dimana jumlah ini merupakan 20% dari total tenaga kerja yang ada. Walaupun demikian Subsektor Tanaman Pangan masih belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang seharusnya ada pada bidang ini.

Tugas peningkatan penyerapan tenaga kerja dan produktivitas kerja di Subsektor Tanaman Pangan untuk masa mendatang dapat dilakukan dengan usaha Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Diversifikasi, walaupun diduga pelaksanaannya berjalan lambat. Khusus untuk Ekstensifikasi, diperlukan pencetakan lahan kering untuk tanaman padi sebesar 20.720 hektar, untuk menyerap tenaga kerja sebesar 10.167 orang di Subsektor Tanaman Padi. Pencetakan lahan dapat dilakukan secara bertahap, dengan

senantiasa menyesuaikan terhadap laju pertumbuhan tenaga kerja dan biaya. Agroindustri merupakan pola pertanian maju, baik ditinjau dari penyerapan tenaga kerja maupun dari nilai tambah yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA.

1. Biro Pusat Statistik. 1981. **"Penduduk Kalimantan dan Sulawesi Menurut Propinsi dan Kabupaten/Kota Madya"**. Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Penduduk Tahun 1980. Seri L No. 6, Jakarta.
2. _____. 1983. **"Proyeksi Angkatan Kerja Indonesia 1983 — 2001**. Bagian Statistik Tenaga Kerja dan Analisa Statistik Sosial. Jakarta.
3. _____. 1983. **"Pendapatan Regional Propinsi-Propinsi di Indonesia"**. Tahun 1976 — 1980. Jakarta.
4. Birowo A.T. 1983. **"Demokrasi Ekonomi, Transformasi, Struktural dan Pembinaan Golongan Ekonomi Lemah dalam Pembangunan Pertanian."** Majalah "Economic" No. 13. Vol. VI. Tahun 1984. Jakarta.
- 4b. Birowo, A.T. 1983. **"Situasi Tenaga Kerja, Setengah Pengangguran dan Kesempatan Kerja di Sektor Pertanian"**. (Makalah disiapkan untuk Lokakarya Nasional Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja). Departemen Pertanian, Jakarta.
5. Kantor Statistik Sulawesi Selatan. 1982. **"Pendapatan Regional Sulawesi Selatan Tahun 1978 — 1981**. Ujung Pandang.
6. _____. 1983. **"Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 1982"**. Ujung Pandang.
7. Kompas, 6 Maret 1984. **"Syarat Kerangka Induk Lepas Landas: Keseimbangan dan Kereserian Antar Bidang Pembangunan"**. Hal 1 dan 12. Jakarta.
8. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 1983. **Studi Kasus: Industri Pangan**. Jakarta.
9. Optimis, Maret 1982. **Kesempatan Kerja Sebagai Persoalan Pembangunan: Laporan Khusus**. No. 26. Jakarta.